

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang menurut asas kepemilikan rakyat pada kerangka demokrasi pancasila. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dimana masyarakat sebagai warga negara berpartisipasi memilih atau menentukan calon dan pemimpin negara melalui proses politik yang dilakukan melalui pemilihan umum. Untuk mewujudkan Sistem Kepemilikan Rakyat demokratis yaitu melalui pemilihan umum. Demokrasi adalah negara yang melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Diselenggarakannya pemilihan umum, Maka rakyat Indonesia bisa berpartisipasi secara aktif ikut andil dalam menentukan wakil rakyat secara langsung maupun tidak langsung.

Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi, sudah berada di dalam jalan politik yang sesuai dikarenakan salah satu proses politik dalam menentukan posisi jabatan legislatif maupun eksekutif yang dilakukan melalui pemilihan umum. Selain sebagai tonggak utama dari sebuah demokrasi, pemilu merupakan wadah atau sarana untuk masyarakat untuk memilih calon pemimpin terbaiknya dan menyalurkan aspirasi baik saran maupun keluhan masyarakat. Pemilu juga merupakan sebuah proses politik yang dapat digunakan untuk mendapatkan legitimasi politik bagi para aktor politik yang ingin duduk di kursi jabatan.

Pada tahun 2019 Indonesia telah merayakan pesta demokrasi. Setiap lima tahun, Indonesia menyelenggarakan pemilihan legislatif dan wakil presiden. Pesta demokrasi pada saat ini cukup menarik karena banyaknya pemilih pemula yang akan mengikuti pesta demokrasi pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

Pemilu ini memiliki tujuan salah satunya adalah untuk membentuk tatanan suatu Negara dan masyarakat didalamnya untuk menjadi lebih baik. Dalam pemilihan umum keterlibatan dari masyarakat berpengaruh karena setiap orang mempunyai pilihan yang berbeda dan kepentingan dalam menentukan pilihannya. Seringkali pemilihan umum dijadikan sebagai patokan dan tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu adalah sebuah cara dan kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan dalam politik sekaligus sebagai ancaman bagi koalisi pertahana. Oleh karena itu pemilu merupakan sebuah akhir untuk para pertahana yang menurut masyarakat tidak memuaskan akan di sampingkan dengan calon pemimpin yang baru. Karena pemilu adalah menivestasi kedaluatan masyarakat.

Bangsa Indonesia setelah merdeka telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak tahun 2004 sebanyak sebelas kali. pertama kali dilaksanakannya pemilu pada tahun 1955 dan berjalan kondusif. Pemilihan umum tersebut dilaksanakan dan berlanngsung dalam situasi lingkungan yang ikut serta dan menentukan hasil dari pemilu. Oleh karena itu pemilu tidak terlepas dari Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Adanya pemilihan umum ini mengindikasikan bahwa inilah demokrasi

terwujud karena terjadi pemindahan kekuasaan pemimpin lama ke pemimpin yang baru secara adil. Pemilu menjadi jembatan untuk menentukan proses pemerintahan dibentuk secara demokratis. Pemilu harus dilaksanakan secara bebas dan bersih yang memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai pemilih untuk memberikan suara kepada pilihannya dan bebas dari Politik uang atau politik perut. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E yang menyebutkan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 mengenai penyelenggaraan pemilu. Asas yang dianut dalam pemilu pada Indonesia adalah “Luber Jurdil”.

Pemilihan umum serentak pertama dilaksanakan pada April 2019. Ini adalah pemilihan umum pertama semenjak pemilihan umum pertama tahun 1955, dalam pemilihan anggota legislatif dan pemilihan eksekutif diadakan secara serentak. Berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, pemilihan umum pada tahun 2019 adalah kasus eksperimental penguatan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu presidensial dan pelembagaan suatu partai politik dan aliansi partai yang sudah terukur.

Negara Indonesia selalu mengadakan pergantian presiden dan wakilnya diadakan setiap lima tahun sekali. Pada waktu pemilihan umum terasa menarik, lantaran banyaknya pemilih pemula yang mengikuti pemilihan generik tersebut. Pemilih pemula ini adalah seseorang berusia 17 tahun pada hari pemilihan & tercatat dalam daftar pemilih tetap.

Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama karena pada dasarnya ini adalah lembaga pendidikan pertama yang ada sejak lahir. Sosialisasi pertama terjadi pertama kali dalam lingkup keluarga, sebab keluarga merupakan tempat dibentuknya karakter & wawasan seseorang anak untuk menjadi anggota masyarakat sesungguhnya. Sebuah keluarga dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan perilaku politik. Perilaku politik pada dasarnya adalah pola perilaku seorang masyarakat pada kehidupan berpolitik. Dari pandangan demokrasi, pemilu adalah kegiatan yang baik untuk perkembangan demokrasi. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan umum menjadi sebuah masalah tersendiri. Karena pada dasarnya tolak ukur dari tinggi atau rendahnya partisipasi politik dan dukungan dari masyarakat kepada pemerintah dan bentuk perilaku yang bersifat rasional.

Dalam sebuah keluarga TNI, kepala keluarga tni tidak diperbolehkan untuk ikut mencoblos pada saat pemilihan umum berlangsung karena sifat tni yang harus netralitas pada saat pemilu. Tetapi keluarganya termasuk anak-anak & istrinya yang telah terdaftar pada DPT bisa mengikuti pemilihan tersebut. Namun biasanya didalam rumah, kepala keluarga sudah mewanti-wanti untuk memilih pasangan yang sesuai dengan pilihan kedua orangtuanya. Anak-anak sudah dipengaruhi untuk memilih yang sama dengan pilihan orangtuanya.

Pada era Presiden Suharto , gerakan reformasi pada tahun 1998 menghasilkan sebuah reformasi pada Tentara Nasional Indonesia dan dikatakan bahwasanya TNI/ABRI berada pada titik terbaik dikarenakan keikutsertaannya dalam politik

Indonesia yang disebabkan oleh dwifungsi-nya. Dengan legalitas tersebut berdasarkan undang undang, TNI secara sah ikut dalam praktik politik pemilihan umum di Indonesia dan sekaligus menjadi kekuatan yang berperan penting selama pemerintahan Suharto berlangsung.

Dengan adanya doktrin dwifungsi ABRI yang dibentuk oleh pemerintahan Orde Baru, muncul pemikiran bahwa dwifungsi ABRI hanyalah sebuah selingan dimana ABRI bukanlah alat untuk menjaga stabilitas dan kekuatan dinamis dalam partai yang sedang berkuasa yang kebanyakan hanya tentang kekuatan partai, namun disini ABRI adalah kekuatan pendukung kekuasaan (Golongan Karya) dan bukan penjaga kedaulatan negara. Keberlanjutan dukungan ABRI terhadap era Orde Baru disebabkan oleh beberapa hal. Dalam penelitian saya kali ini yang berjudul analisis Pengaruh Preferensi Kepala Keluarga Tni Dalam Pemberian Hak Pilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Komplek Marinir Cilandak Jakarta Selatan yang dimana penelitian ini dilakukan atas dasar profesionalitas dan netralitas tni dalam pilpres 2019. Judul ini dibuat karena adanya temuan beberapa dari narasumber yang dimana tni ini diuji kenetralannya dalam pilpres 2019.

Dengan kata lain penulis tertarik guna menganalisis dampak ketua keluarga tni pada pilpres 2019. Meskipun kepala keluarga TNI tidak memiliki hak pilih dalam setiap pemilihan umum maupun pemilihan presiden, tetapi istri beserta anak-anak dari kepala keluarga tni ini memiliki hak mereka untuk menentukan pilihannya dalam pemilu maupun pemilihan presiden hal ini banyak sekali opini maupun temuan di

sekitar warga Komplek Marinir Cilandak yang dimana keluarganya itu digiring memilih salah satu pasangan capres dan cawapres. ditinjau berdasarkan pasal 39 UU Nomor 34 tahun 2004 yang tercantum disana hanyalah anggota Tentara Nasional Indonesia saja yang tidak bisa terlibat pada aktivitas-aktivitas politik & terbukti tidak terdapat aturan yang mengatur tentang anggota keluarga TNI pada kegiatan-kegiatan politik yang ada pada Indonesia. Sehingga kebanyakan anggota tni ini menggiring keluarganya untuk memilih paslon tertentu yang menurut anggota tni ini menguntungkan pekerjaan anggota tni yang sesuai dengan visi misi dari segenap anggota tni.

B. Rumusan Masalah

Dari kesimpulan diatas penulis merumuskan perkara yaitu Seberapa Tinggi Pengaruh Preferensi Kepala Keluarga Tni Dalam Memberikan Hak Pilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Komplek Marinir Cilandak Jakarta Selatan?

C. Batasan Masalah

Pembatasan perkara dilakukan supaya penelitian ini lebih terarah & tidak menyimpang berdasarkan tujuan utama penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pembahasan pada pokok permasalahan penelitian, yaitu Pengaruh Preferensi Kepala Keluarga Tni Dalam Pemberian Hak Pilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Komplek Marinir Cilandak Jakarta Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Dampak preferensi Kepala Keluarga TNI dalam Pemberian Hak Pilih Anggota Keluarga dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 di Komplek Marinir Cilandak Jakarta Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bisa menaruh output yang berguna sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara mudah dan juga teoritis.

1. Secara Teoritis

Secara teori, Penelitian tersebut bisa menambah khasanah keilmuan pada bidang politik dan pemerintahan. Melalui penelitian ini, mahasiswa sosial politik dapat memberikan pengetahuan dalam bidang akademik yang berkaitan dengan Pengaruh Preferensi Kepala Keluarga TNI Dalam Pemberian Hak Pilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Komplek Marinir Cilandak Jakarta Selatan.

2. Secara Praktis

Pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dari ringkasan penelitian ini, khususnya di bidang partisipasi politik tentang Bagaimana sebuah Pengaruh Preferensi Kepala Keluarga TNI Dalam Pemberian Hak Pilih Pada Pemilu.